

PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MEMBANGUN KARAKTER GENERASI MUDA

Oleh

Abdul Wahab Abdi

Dosen FKIP Unsyiah Darussalam, Banda Aceh
wahababdi.fkip@gmail.com

ABSTRAK

Perguruan tinggi merupakan salah satu jenjang pendidikan yang pada dirinya melekat fungsi tri darma perguruan tinggi. berdasarkan fungsi tersebut, perguruan tinggi diharapkan dapat melakukan peran yang lebih signifikan dalam membangun karakter bangsa, terutama generasi muda. Sebab, selama ini karakter bangsa berada pada titik nadir. Berbagai konflik sosial menjadi fakta bahwa karakter bangsa berada pada taraf yang cukup mengkhawatirkan. Dalam konteks ini, perguruan tinggi dapat mengambil peran sebagai salah satu ujung tombak pengembangan karakter generasi muda melalui penanaman nilai luhur bangsa kepada mahasiswa. Mahasiswa tidak hanya dibekali dengan pengetahuan keahlian inti, melainkan juga dibekali dengan pengetahuan keagamaan, budi pekerti, kepribadian, dan etika serta nilai-nilai ideologis kebangsaan.

Kata kunci: Perguruan Tinggi, Karakter, Generasi Muda

PENDAHULUAN

Kelahiran era reformasi diyakini sebagai dambaan sebagian besar rakyat Indonesia. Dengan era reformasi diharapkan akan mengantarkan kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik dan demokratis. Semua pihak menggantungkan harapan kelak melalui reformasi rakyat terbebas dari sistem pemerintahan Orde Baru yang otoriter dan militeristik. Karena itu tidak mengherankan kelahiran era reformasi disambut gemuruh dan gegap gempita oleh segenap lapisan masyarakat. Semangat euforia menyambut era reformasi membahana di seluruh penjuru negeri.

Harapan masyarakat untuk segera bebas dari sistem pemerintahan Orde Baru dapat dirasakan beberapa saat memasuki era reformasi. Rakyat kembali memiliki kebebasan yang selama 30 tahun lebih terkungkung. Institusi demokrasi lahir bagaikan jamur di musim hujan. Pemilu berlangsung lebih demokratis, dan salah satunya adalah Pemilu Presiden (PILPRES) yang berlangsung secara langsung sejak tahun 2004.

Namun, bersamaan dengan lahirnya era reformasi itu tidak sedikit pula kebebasan telah disalahgunakan banyak pihak. Era reformasi telah

mendorong pihak tertentu bertindak bebas seakan-akan tidak ada batasnya. Akibatnya, pascareformasi telah melahirkan aneka konflik horizontal dan vertikal yang dilatarbelakangi oleh beragam faktor dengan eskalasi yang demikian mengkhawatirkan. Konflik ini terjadi di hampir seluruh pelosok tanah air. Tahun 2007 saja tercatat 185 kekerasan yang berlatarbelakang agama dan keyakinan (Kompas, 2008). Jumlah ini belum termasuk tindak kekerasan yang dipicu oleh faktor politik, sosial, dan ekonomi.

Kekerasan sering terjadi tanpa diduga sama sekali karena dipicu oleh masalah sepele. Intensitas tawuran antarpelajar, mahasiswa, warga, perkelahian antarelite politik hingga teror bom dan terorisme meningkat tajam. Penyampaian aspirasi melalui pengerahan massa kerap kali menjurus ke tindak anarkisme. Dengan kata lain hampir semua perselisihan atau beda pendapat selalu diselesaikan dengan cara-cara kekerasan. Konflik dan kekerasan ini bagaikan hujan sehari yang menghapuskan panas setahun. Atmosfer budaya ke-Indonesia-an yang dikenal santun, ramah, dan sarat nilai etika warisan leluhur yang diagung-agungkan terasa hilang dalam sekejap.

Tragedi kekerasan di tanah air yang dipublikasi secara luas di media massa dalam dan luar negeri akhirnya membentuk opini negatif tentang Indonesia. Opini luar negeri menilai Indonesia sebagai salah satu negara yang tidak aman, dan tidak terjamin keselamatan nyawa. Padahal menurut Teori Hirarki Kebutuhan Maslow rasa aman dan hidup dalam suasana damai serta kondusif merupakan substansi dari kebutuhan manusia (Handoko, 1992). Penilaian negatif terhadap Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya *travel warning* oleh beberapa negara kepada warga negaranya. *Travel warning* secara signifikan berdampak negatif terhadap terhadap sektor pariwisata.

Munculnya berbagai konflik sosial ini menimbulkan keprihatinan banyak pihak. Jika fenomena ini terus berlanjut, tidak tertutup kemungkinan bangsa Indonesia akan terus terjebak dalam konflik sosial sehingga harus menguras energi demikian besar untuk memadamkannya. Karena itu, konflik sosial yang melanda Indonesia harus segera dicarikan alternatif oemecahannya agar tidak berlanjut.

Salah satu alternatifnya ialah harus segera merekonstruksi kembali karakter bangsa Indonesia, yaitu sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan menerapkannya dalam kehidupan mereka. Agar tercipta bangsa berkarakter kebangsaan, maka salah satu upaya yang harus segera dilakukan ialah membentuk individu-individu cinta damai sebagai elemen penyusun masyarakat. Salah satu jalur untuk merekonstruksi masyarakat cinta damai adalah pendidikan, karena pendidikan sebagai ikhtiar manusiawi untuk mendewasakan peserta didik sesuai dengan nilai dasariah dan yang membesari mereka (Daud, 2002) merupakan tawaran

strategis yang dapat dimanfaatkan untuk membangun dan membentuk manusia cinta damai.

Sehubungan dengan latar belakang masalah di atas, risalah ini selanjutnya akan menelaah peran pendidikan dalam membangun karakter bangsa. Kajiannya difokuskan pada peran perguruan tinggi. Atas dasar itu, maka masalah dalam makalah ini ialah bagaimana peran perguruan tinggi dalam membangun karakter bangsa. Tujuan kajian teoretis ini adalah untuk mengetahui (1) peran pendidikan dalam membangun karakter bangsa; dan (2) peran perguruan tinggi dalam membangun karakter bangsa.

PEMBAHASAN

Konflik Sosial

Pandangan sosiolog terhadap realita pluralisme di dalam masyarakat terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama melihat kemajemukan merupakan potensi yang cukup bernilai untuk merajut kebersamaan dan keutuhan bangsa. Kelompok kedua melihat sebaliknya, bahwa pluralitas adalah potensi yang dapat memicu konflik sosial yang dapat memicu disintegrasi bangsa. Alasannya adalah bahwa kehadiran entitas kemajemukan di satu segi, dan pemilahan diri secara benar dalam segi yang lain, menghadirkan dua sisi dari satu mata uang, yaitu permusuhan dan persaudaraan, serta ketegangan dan harmoni (Thohir, 2007; Sofyan, 2003).

Atas dasar ini maka pluralisme ini dapat dikatakan peluang strategis, karena jika mampu dikelola dengan baik akan menjadi potensi perekat keutuhan bangsa yang amat kuat dan tinggi nilainya. Modal awal yang diperlukan di sini adalah bagaimana memaknai konflik sebagai suatu jalan atau sarana menuju perubahan masyarakat (Sriyanto, 2007), atau dalam istilah lain melihat konflik dari sudut positif (Thohir, 2007). Keberhasilan mengelola heterogenitas menjadi satu keutuhan dengan kehesivitas yang kuat dapat mendongkrak pamor Indonesia di mata internasional sebagai negara yang mampu menjadikan perbedaan untuk merajut kebersamaan.

Sebaliknya, faktor pluralisme dapat menjadi ancaman strategis karena perbedaan kerap kali menjadi sumber pemicu konflik. Kemajemukan tidak hanya terbatas pada entitas, tapi juga dinamika dan akibat dari kinerja, sehingga mengelompokkan diri dalam satuan-satuan sosialnya, sesuai dengan kesamaan asal usul kedaerahan (primordial), etnik, agama, profesi, potensi, dan kepentingan. Pada saat yang bersamaan juga hadir dan menghadirkan kelompok lain yang tidak sama sebagai kelompok yang berada di luarnya. Dari sinilah mulai dikenal adanya "orang dalam" lawan "orang luar", dan kecenderungan ini menyebabkan sejarah kehidupan manusia itu ke dua sisi dalam satu mata uang, yaitu konflik dan harmoni (Thohir, 2007). Dalam bahasa lain konflik dan persatuan dapat dilihat sebagai bentuk lain dari *siciation*, yang berarti yang satu tidak lebih penting

atau lebih mutlak dari yang lain. Konflik dan kompromi (*consensus*) keduanya bisa saja dan merupakan interaksi yang bersifat resiprokal (Djunaidi, 2003).

Definisi konflik telah banyak dikemukakan para pakar. Dari beragam definisi tersebut, secara umum konflik adalah kecekakan, pertentangan, perselisihan, atau gesekan yang disebabkan oleh perbedaan kehendak, dan entitas sosial antara dua atau lebih pemain (*actor*) dalam suatu satuan wilayah tertentu, dan deprivasi sosial (Alhumami, 2007; Amstutz, 1995; Salim, 2007; dan Thohir, 2007). Berdasarkan sudut pandang yang beragam itu, Liliweri (2005) merumuskan delapan definisi konflik yaitu (1) bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan individu atau kelompok karena terlibat dalam perbedaan sikap, kepercayaan, nilai, serta kebutuhan (*need*); (2) hubungan pertentangan antara dua pihak atau lebih yang memiliki sasaran tertentu, namun diliputi pemikiran, perasaan, atau perbuatan yang tidak sejalan; (3) Pertentangan atau pertikaian karena perbedaan dalam hal kebutuhan, nilai dan motivasi pelaku yang terlibat di dalamnya; (4) proses yang terjadi ketika satu pihak secara negatif mempengaruhi pihak lain dengan melakukan kekerasan fisik; (5) pertentangan yang bersifat fungsional karena pertentangan semacam itu mendukung tujuan kelompok dan mempengaruhi tampilan, namun disfungsional karena meniadakan tampilan kelompok yang sudah ada; (6) proses mendapatkan monopoli ganjaran, kekuasaan, pemilikan, dengan menyingkirkan atau melemahkan pesaing; (7) bentuk perlawanan yang melibatkan dua pihak secara antagonis; dan (8) kekacauan rangsangan kontradiktif dalam diri individu.

Pandangan ini kemudian yang mendasari simpulan bahwa konflik kerap muncul karena (1) nilai, yaitu perbedaan rasa percaya, keyakinan, bahkan ideologi atas apa yang diperebutkan; (2) kurangnya komunikasi, yakni kegagalan berkomunikasi karena kedua pihak tidak dapat menyampaikan pikiran, perasaan, dan tindakan sehingga jurang perbedaan di antara kedua pihak; (3) kepemimpinan yang kurang efektif, sehingga menyebabkan anggota masyarakat mudah bergerak; (4) ketidakcocokan peran, yaitu akibat adanya dua pihak yang mempersepsikan secara berbeda tentang peran masing-masing; (5) produktivitas rendah, yaitu tidak adanya keuntungan dari hubungan antara dua atau lebih yang terlibat di dalamnya, dan kesenjangan ekonomi antara sikaya dengan simiskin termasuk ke dalam konflik jenis ini; (6) perubahan keseimbangan, konflik yang muncul karena perubahan keseimbangan di dalam masyarakat baik karena faktor alam maupun sosial; dan (7) karena dendam, yaitu konflik akibat masalah lama belum terpecahkan melalui cara-cara musyawarah (Liliweri, 2005).

Menilik kasus yang diangkat dalam kajian ini, yaitu konflik Aceh, dapat dikatakan bahwa yang terjadi di Aceh adalah konflik berbasis lokal, yaitu konflik yang menggunakan kekuatan rakyat untuk melawan aparat

pemerintah atau pemerintah (Sriyanto, 2007). Konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah RI, menurut Kalla (2009) termasuk konflik vertikal. Konflik ini berbeda dengan yang terjadi di Kalimantan (Sampit), Maluku, dan Poso dan beberapa konflik lain di tanah air.

Berkaitan dengan penyebab, paling tidak penyebab konflik Aceh mulai dari gerakan DI/TII hingga ke GAM ada dua faktor. *Pertama*, karena nilai, yaitu perbedaan rasa percaya, keyakinan, dan ideologi atas apa yang diperebutkan. *Icon* gerakan DI/TII yang dikomandoi Tgk Muhammad Daud Beureu'eh adalah kekecewaan terhadap pemerintahan Soekarno yang tidak menepati janji sehingga harus diperjuangkan dengan cita-cita mendirikan negara Islam. *Kedua*, karena produktivitas rendah atau faktor kesenjangan ekonomi. Ini terlihat jelas dari perjuangan GAM yang mengedepankan ketidakadilan ekonomi sebagai alasan pemberontakan (Kalla, 2009). lalu berkembang menjadi konflik politik yang ditandai dengan keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI.

Konflik sosial dapat dipahami dari dua dimensi seperti dikemukakan Djunaedi (2003), yaitu konflik dianggap selalu ada dan mewarnai segenap aspek interaksi manusia dan struktur sosial; dan konflik adalah pertikaian terbuka (*manifest conflict*) seperti perang, revolusi, pemogokan dan perlawanan. Konflik Aceh berkaitan dengan keduanya. Artinya, boleh jadi konflik Aceh berawal pada konflik sosial dan berakhir pada konflik bernuansa politik. Karena itu, untuk keperluan kajian lebih lanjut, berikut ini diuraikan beberapa variabel ancaman strategis yang berhubungan dengan konflik.

Telaahan tentang konflik sosial yang dilakukan para pakar dari berbagai disiplin ilmu sepakat bahwa *konflik* dan *damai* adalah dua frasa yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Konflik dan damai merupakan dua potensi di dalam masyarakat yang tidak dapat dipisahkan, bagaikan dua sisi dari satu mata uang (Thohir, 2007; Sofyan, 2003). Pada satu sisi konflik merupakan sesuatu yang hampir tidak mungkin bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Selama masyarakat masih memiliki kepentingan, kehendak, serta cita-cita konflik senantiasa mengikuti mereka (Sriyanto, 2006). Pada sisi lain tidak ada seorang pun menyukai dan konflik, karena konflik menimbulkan penderitaan, ketidak-amanan, bahkan makan korban jiwa dan harta. Sebaliknya damai itu indah, dan oleh karena itu semua orang menginginkan kedamaian (Kalla, 2009). Selama manusia masih mampu berpikir dengan menggunakan nurani, maka selama itu pula kedamaian akan menjadi kebutuhan manusia. Di sinilah esensi pendidikan damai harus menjadi ruh sistem pendidikan yang kita kembangkan.

Menanggapi tragedi kekerasan yang sering berujung pada korban nyawa, muncul aneka komentar, pendapat, dan tanggapan. Umumnya komentar tersebut menyimpulkan bahwa kekerasan di Indonesia disebabkan

oleh dua faktor, yaitu faktor warisan Orde Baru, dan kegagalan sistem pendidikan kita.

Selama 30 tahun rakyat terkungkung, aspirasi tersumbat, aktivitas dikontrol, dan gerak-gerik rakyat dipantau. Praktik diskriminatif dan distingtif negara terhadap rakyat, kekerasan negara terhadap rakyat “dilegalkan” dan begitu masif. Akibatnya ialah ikatan senasip-sependeritaan-seperjuangan yang dilandasi oleh ikatan primordial, kelokalan, kesukuan, dan keagamaan tumbuh subur dalam masyarakat. Selama kekuatan negara (*power state*) masih mampu ‘mengelola’ fenomena ini, selama itu pula tak pernah muncul ke permukaan, dan ini berhasil dipraktikkan oleh pemerintahan Orde Baru. Tapi kekuatan laten tersebut terus mendesak dan mendobrak segala bentuk kungkungan walau dilakukan oleh negara sekalipun. Puncaknya ialah saat reformasi yang memuntahruahkan semua kekuatan laten yang telah lama mengkristal itu.

Akibat kuatnya ikatan primordial, kelokalan, kesukuan, dan keagamaan selama praktik negara yang otoriter dan meliteristik, maka saat terlepas dari kungkungan akan membentuk konstelasi baru yang perekatnya juga masih faktor primordial. Ketegangan demi ketegangan baru yang cenderung bersifat laten terus bermunculan sehingga menyebar menjadi praktik kekerasan. Ury (1999) mengatakan bahwa konflik biasanya dimulai dari adanya ketegangan-ketegangan yang bersifat laten, kemudian berkembang menjadi konflik terbuka berupa pengerahan kekuatan. Bila telah melampaui ambang totelaransi, maka konflik yang ada akan menjurus kepada sifat-sifat destruktif dan pelanggaran terhadap nilai-nilai sosial dan aturan hukum.

Iklim kebermasyarakatan yang *anomie*, yaitu masyarakat yang menempatkan yang kuat berkuasa ini terus memupuskan rasa nasionalisme dan kebersamaan. Rasa nasionalisme dan kebersamaan ini luntur karena terkikisnya semangat solidaritas. Padahal solidaritas amat esensial maknanya, karena ia mencakup upaya mempertahankan dan mengembangkan rasa kebersamaan, saling menghormati, toleransi, empati, mau mengakui kesalahan serta siap mengorbankan pribadi, kelompok, dan golongan untuk kepentingan bersama (Kompas, 2008).

Selain sebagai warisan Orba, tragedi ‘berdarah-darah’ pasca-reformasi juga ditengarai akibat kegagalan sistem pendidikan. Sistem pendidikan kita telah gagal membangun jatidiri bangsa yang kita kenal dengan ‘manusia seutuhnya’. Bagi pakar yang mengajukan argumen ini khususnya pakar pendidikan menyampaikan alternatif pemecahannya, yaitu sudah saatnya kita perlu membangun karakter bangsa (*character building*) bangsa yang selama ini sudah hilang ditelak arus globalisasi.

Pendidikan sebagai usaha sengaja dan sistematis memberdayakan anak bangsa merupakan ujung tombak dalam pembangunan karakter bangsa

ini, khususnya para pemuda. Melalui pendidikan ditanam nilai-nilai budaya, etika dan estetika agar generasi muda mengetahui, mengenal, memahami dan mempraktikkan dalam kehidupan nyata. Pendidikan harus dikembalikan kepada posisi sebagai salah satu wahana pembangunan dan pembentukan karakter pemuda.

Karakter Pemuda

Dari sudut pandang ilmu sosial, “pemuda” atau “generasi muda” adalah konsep yang sering disarati oleh nilai-nilai. “Pemuda harapan bangsa”, “pemuda perawis masa depan” dan “pemuda calon pemimpin bangsa” merupakan frasa yang memperlihatkan betapa saratnya nilai yang melekat padanya. Ini dapat dimaklumi karena pemberian istilah tersebut bukan atas dasar pertimbangan ilmiah, melainkan atas dasar pertimbangan sosio-kultural dan ideologis belaka (Abdullah, 1974).

Secara historis pemuda Indonesia juga beberapa negara lain terbukti telah tampil sebagai kekuatan sosial dan politik yang dahsyat. Kekuatan pemuda baik secara fisik maupun intelektual berhasil melakukan pembebasan rakyat dari cengkaman kolonial, menghandarkan Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan, sampai ke pada gerakan di zaman kemerdekaan menentang kekuasaan negara yang tidak sejalan dengan jiwa dan semangat kemerdekaan. Pemuda telah membuktikan hal itu dan dicatat dalam lembaran sejarah, walaupun bentuknya tidak sama karena tergantung kepada dialektika dan kondisi kontekstual yang dihadapi.

Terakhir pemuda termasuk di dalamnya mahasiswa telah berhasil menumbangkan kekuatan Orba yang otoriter dan militeristik. Hasilnya ialah terciptanya reformasi dalam segala bidang untuk mewujudkan demokratisasi. Namun, yang terjadi hari ini di luar prediksi. Reformasi telah membentuk masyarakat Indonesia yang semakin jauh dari perilaku santun, beradab, dan beretika. “Wajah” Indonesia yang dikenal santun berubah menjadi “wajah” beringas. Anomali ini merupakan refleksi atau cerminan dari karakter masyarakat kita, khususnya karakter pemudanya.

Sejarah mencatat tokoh muda pada awal kemerdekaan yang “bertengkar” dalam mempertahankan pendapat masing-masing, namun begitu keluar dari ruang rapat mereka saling berpelukan. Mohammad Hatta yang merasa tidak sejalan dengan kebijakan Soekarno memilih mundur dari jabatan Wakil Presiden. Mohammad Natsir yang bertengkar hebat dengan Soekarno, tapi tak pernah menggalang massa untuk menjatuhkan Presiden Soekarno. Banyak tokoh lain yang memperlihatkan sikap santun dalam kehidupan mereka, khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Semua ini kearifan sejarah yang harus diekstrak dari peristiwa masa lalu, kemudian dijadikan pegangan dan diimplementasikan dalam kehidupan kekinian. Kita boleh berubah dan mentransformasikan diri sesuai dengan perubahan zaman, tapi jangan hanyut dengan perubahan itu. Ada nilai-nilai

budaya yang harus dilestarikan, dihayati dan diterapkan dalam kehidupan kekinian. Jepang adalah negara yang terus berubah, melakukan transformasi dalam segala hal. Tapi dalam hal nilai budaya, Jepang tak pernah berubah, sehingga dikenal dengan istilah *Japan is transformed, but never transformed*.

Peran Perguruan Tinggi

Secara esensial pendidikan adalah pembiasaan peserta didik untuk mengenali, mengetahui, memahami dan menerapkan nilai-nilai luhur yang telah disepakati bersama secara kolektif sebagai bangsa. Nilai luhur ini berakar dari masyarakat sekitar baik dalam bentuk tekstual maupun kontekstual. Selain itu pendidikan juga pembiasaan peserta didik untuk mengenali, mengetahui, dan menerapkan nilai-nilai baru (asing) yang berguna untuk kepentingan individu maupun bangsa. Dengan kata lain menurut Zamroni (2000) peran pendidikan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara ada dua. *Pertama*, pendidikan merupakan upaya nasional yang dilakukan secara sistemik untuk menjamin eksistensi bangsa dan cara menjaga kelestarian budaya bangsa dari generasi ke generasi berikutnya. *Kedua*, pendidikan juga harus berperan sebagai upaya melakukan perubahan sosial yang dilakukan secara sadar dan sistemik menuju tatanan sosial baru seiring dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain pendidikan adalah usaha pembudayaan nilai-nilai lama dan baru dari generasi satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam menjalankan fungsinya, sistem pendidikan nasional paling kurang mempunyai tiga tanggung jawab utama. *Pertama*, tanggung jawab konstitusi yang secara eksplisit dinyatakan dalam UUD 1945. *Kedua*, tanggung jawab ekonomi yaitu memberdayakan rakyat agar mampu mengakses sumber ekonomi menjadi mata pencaharian yang layak dengan pendapatan yang memadai. *Ketiga*, tanggung jawab sosial yaitu memberikan kesempatan yang luas dan sama untuk memperoleh akses pendidikan tanpa memandang perbedaan gender, suku, dan agama.

Ditinjau dari aspek tujuan, maka pendidikan pada dasarnya bertujuan membekali peserta didik dengan kompetensi dasar (kemampuan intelektual) dan kompetensi nyata (penerapan ilmu), atau yang sekarang dikenal dengan *life skill*. Namun untuk merajut keduanya juga diperlukan keterampilan hati (*heart skills*), yaitu sikap perilaku yang senafas dan mesti mengintari proses pendidikan itu sendiri (Daud, 2002). Makna perilaku senafas di sini ialah nilai budaya masyarakat di mana pendidikan itu berlangsung, atau kearifan lokal (*local genius*) tempat pendidikan berlangsung. Hal ini pula yang mendasari munculnya gagasan kurikulum bermuatan lokal.

Mengakari diri pada peran, fungsi, tanggung jawab, dan tujuan pendidikan, maka perguruan tinggi (PT) sebagai bagian dari sistem

pendidikan nasional merupakan salah satu instrumen nasional yang pada lembaga pendidikan ini melekat fungsi tri darma perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang berada pada jenjang tertinggi dari jenjang pendidikan lainnya, juga ditugasi menumbuh-kembangkan potensi generasi muda menjadi generasi yang ideal sebagai mana harapan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945. Generasi muda yang ideal ini dikenal sebagai generasi muda yang memiliki jati diri dan berkarakter ke-Indonesia-an. Globalisasi boleh menerpanya, namun ia tidak boleh tenggelam ke dalam arus itu, dan akar ke-Indonesia-an harus menancap dalam diri generasi muda.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perguruan tinggi menawarkan mata kuliah yang diwajibkan terdiri atas kelompok matakuliah keahlian, profesi, bersama, dan kelompok matakuliah pengembangan kepribadian (MPK). Mengacu pada PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa kurikulum tingkat satuan PT wajib memuat matakuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Bahasa Indonesia dan Pendidikan Bahasa Inggris. Bahkan sebagian pimpinan PT, terutama di pulau Jawa mendesak agar Dirjen Dikti Depdiknas memasukkan kembali Pendidikan Pancasila dan pendidikan budi pekerti sebagai bagian dari MPK sebagaimana pernah diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 038/U/2002. Matakuliah ini dimaksudkan untuk membina kepribadian mahasiswa agar memiliki jati diri dan karakter kebangsaan.

Akhir-akhir ini juga muncul wacana program *peace building* yaitu proses *cultural internalization* yang hanya dapat diwujudkan dengan penguatan masyarakat cair. Dalam masyarakat lokus itu disediakan oleh lembaga pendidikan termasuk PT yang mempertemukan anak-anak bangsa dalam dunia yang tidak saja menawarkan pencerahan intelektual, tapi juga penguatan kultur kebersamaan. Dengan demikian tujuan pendidikan kita tidak lagi terbatas pada penciptaan manusia cerdas, beragama, beriman, dan bermoral, tetapi juga menciptakan manusia pembangunan dan pencinta damai (Tambunan, 2005).

Pada tahun 2002 di Aceh juga pernah coba dikembangkan kurikulum damai yang mirip dengan *peacebuilding* ini, namun baru dimulai untuk jenjang SD dan SLTP yang disponsori oleh UNESCO. Gagasan ini muncul karena dilandasi oleh kenyataan bahwa Aceh menjadi salah satu daerah yang begitu lama didera dalam konflik.

Persoalan yang masih belum terpecahkan hingga sekarang ialah mengapa upaya tersebut belum membuahkan hasil sebagai mana diharapkan. Hipotesis yang sering diajukan adalah pendidikan kita masih menganut aliran Plato yang lebih menekankan pada aspek kognitif dan mengabaikan aspek afektif, dan psikomotor. Salah satu buktinya ialah,

belum tentu seorang siswa atau mahasiswa yang nilai mata pelajaran agama 10 dapat atau mau melakukan praktik keagamaan dengan nilai yang sama.

PENUTUP

Berdasarkan uraian sebelum ini, maka dapat disimpulkan bahwa (1) Era reformasi yang tujuan utama membangun demokrasi di tanah air menuju masyarakat madani, ternyata yang terjadi adalah munculnya masyarakat yang tidak santun, anarkis, dan premanisme; (2) Sifat anarkisme dan premanisme masyarakat Indonesia diduga sebagai warisan Orba dan akibat kegagalan sistem pendidikan; (3) Pembangunan karakter bangsa, khususnya karakter pemuda perlu segera dilakukan mengingat pemuda sarat dengan nilai sosio-kultural dan ideologis; (4) Perguruan Tinggi berperan penting dalam membangun karakter pemuda, dan selama ini telah dilakukan melalui pemuatan matakuliah kepribadian kepribadian dalam kurikulum satuan pendidikan tinggi; dan (5) Pendidikan kita cenderung mengutamakan pencapaian tujuan aspek kognitif, sementara aspek afektif dan psikomotorik terabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Daud, Darni, M. (2002). Pendidikan yang berakar syariat. Dalam Fairus M. Nur Ibrahim (Ed). *Syariat di wilayah syariat*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD.
- Djunaidi, Abdul (2003). *Dimensi budaya dalam situasi konflik di Aceh*. Makalah disajikan pada Kongres Kebudayaan V di Bukittinggi tanggal 20-23 Oktober 2003.
- Handoko, Martin (1992). *Motivasi daya penggerak tingkah laku*. Yogyakarta: Kanisius. Kompas, Edisi 24 Oktober 2008, hal. 41-44.
- Kalla, M. Jusuf (2009). *Perdamaian dan pembangunan bangsa*. Orasi ilmiah yang disampaikan pada upacara penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Soka, Tokyo, Jepang, tanggal 2 Februari 2009. www.setneg.go.id. Diakses tanggal 10 Mei 2009.
- Tambunan, Fietz R (2005). *Peacebuilding*, kurikulum bangsa. Kompas. Edisi 20 Juli 2005. hal. 6.
- Thohir, Mudjahirin (2007). *Kekerasan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia: Suatu pendekatan sosial budaya*. Semarang: Badan Penerbit Undip
- Ury, William (1999). *Getting to peace: Transforming conflict at home, at world, and in the world*. Ney York: Viking.
- Zamroni (2000). *Paradigma pendidikan masa depan*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.